

RINGKASAN

Fazilatur Rahmi
NIM.200510091

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

(Dr. Zul Akli, S.H., M.H. Dan Dr. Yusrizal Hasbi, S.H., M.H.)

Perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun kenyatannya perlindungan hukum bagi anak pelaku dan anak korban kekerasan seksual belum diberikan secara maksimal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku dan korban kekerasan seksual, serta hambatan dan upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak pelaku.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, data diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwasanya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban kekerasan seksual yaitu perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak pelaku lebih mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dengan lebih dikedepankannya upaya diversifikasi dan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual diberikan perlindungan dengan memberikan restitusi untuk pemulihan kembali secara psikologis dan medis, tetapi perlindungan yang diberikan belum maksimal dalam hal perlindungan identitas nama anak korban masih belum sepenuhnya terlindungi dan belum adanya rumah aman untuk korban. Hambatan serta upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak pelaku yaitu anak kesulitan memberikan keterangan saat pemeriksaan, kurangnya alat bukti, keterangan anak berdiri sendiri, hakim wajib mempunyai sertifikat pelatihan perkara anak dan kurangnya pemahaman hukum masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi adalah hakim melakukan komunikasi yang ramah kepada anak, memfasilitasi pelaksanaan *visum et repertum* kepada korban sebagai salah satu alat bukti, dan menunjukan hakim tunggal yang memahami masalah anak.

Disarankan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk lebih maksimal memberikan perlindungan kepada anak khususnya meningkatkan perlindungan identitas anak korban, dan merealisasi Rumah Aman untuk korban di wilayah Kabupaten Aceh Utara serta pengawasan dari keluarga dan masyarakat harus lebih berperan aktif dalam pencegahan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Korban, Kekerasan Seksual, Anak Pelaku.

SUMMARY

Fazilatur Rahmi
NIM.200510091

LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AS VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE PERPETRATED BY CHILD PERPETRATORS

(Dr. Zul Akli, S.H., M.H. Dan Dr. Yusrizal Hasbi, S.H., M.H.)

Legal protection of children is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning child protection. Every child is entitled to protection to ensure the fulfillment of rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally, and receive protection from violence and discrimination. However, in reality, legal protection for child perpetrators and child victims of sexual violence has not been maximized.

This study aims to determine how the legal protection of children who are perpetrators and victims of sexual violence, as well as obstacles and efforts in providing legal protection to child victims of sexual violence committed by child perpetrators.

This research uses empirical juridical research methods with a statutory approach and a case approach, data obtained through field and library research, data analysis is carried out qualitatively.

Based on the results of the study, the legal protection of children as perpetrators and victims of sexual violence is that the legal protection provided to child perpetrators prioritizes the Restorative Justice approach by prioritizing diversion efforts and legal protection for child victims of sexual violence is given protection by providing restitution for psychological and medical recovery, but the protection provided has not been maximized in terms of protecting the identity of the names of child victims is still not fully protected and there is no safe house for victims. Obstacles and efforts in providing legal protection to child victims of sexual violence committed by child perpetrators, namely children having difficulty providing information during examinations, lack of evidence, child testimony stands alone, judges are required to have a child case training certificate and lack of understanding of public law. Efforts made in overcoming the obstacles faced are judges conducting friendly communication with children, facilitating the implementation of visum et repertum to victims as one of the evidence, and showing a single judge who understands children's problems.

It is recommended that the Lhoksukonyar'iyah Court provide maximum protection to children, especially increasing the protection of the identity of child victims, and realizing Safe Houses for victims in the North Aceh Regency area and supervision from families and communities must play a more active role in preventing sexual violence against children.

Keywords: Legal Protection, Child Victims, Sexual Violence, Child Perpetrators.